

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan bagian penting dalam pembangunan di setiap negara di dunia, pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan suatu negara untuk mengubah perekonomian yang kurang maju dan berpendapatan rendah menjadi suatu perekonomian yang modern serta mencapai taraf kemakmuran yang tinggi. Kemakmuran masyarakat merupakan taraf kehidupan rata-rata yang telah dicapai oleh masyarakat tolak ukur taraf kemakmuran masyarakat dilihat dari pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata yang diperoleh masyarakat di suatu negara. Pembangunan ekonomi dapat diwujudkan apabila pendapatan per kapita masyarakat terus meningkat pada tingkat yang cukup cepat (Fitri Amelia *et al.*, 2020).

Pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dengan adanya pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dimana pertumbuhan dalam hal ini dapat berupa pengembangan atau perluasan atau peningkatan dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat sehingga pertumbuhan akan terjadi akibat adanya pembangunan. Pertumbuhan ekonomi terjadi dimana adanya peningkatan dan pertumbuhan dalam produk nasional *bruto riil* (pendapatan nasional riil). Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila *output* per-kapita mengalami kenaikan yang diukur dengan *output riil* per orang (Prawoto *et al.*, 2014).

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia memiliki sebuah hambatan dalam prosesnya salah satunya adalah tingginya angka pengangguran di Indonesia. Badan Pusat Statistik (2022) menyatakan penduduk berusia 15 tahun

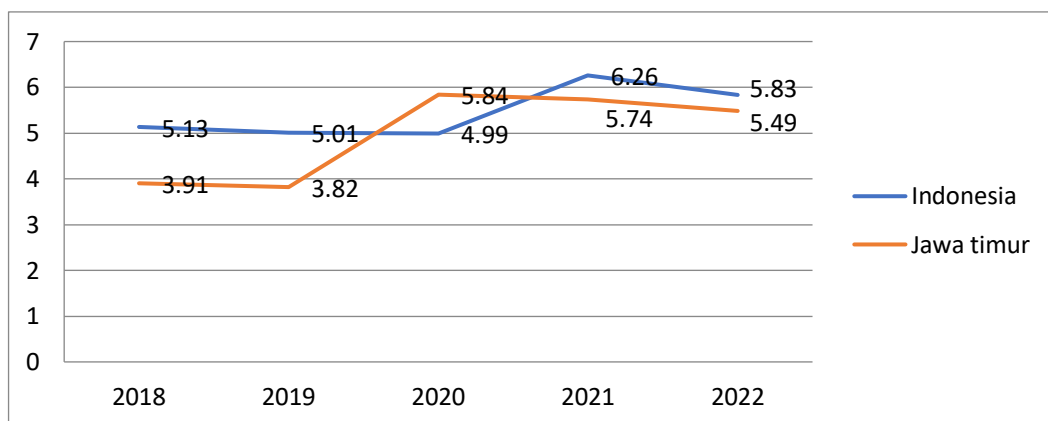
ke atas yang sudah menyerah mencari pekerjaan atau berstatus tidak sedang bekerja namun mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Indonesia menempati posisi ke 11 dengan tingkat pengangguran tertinggi di dunia dengan angka pengangguran per Februari 2023 sebesar 5,45%. Pengangguran di bagi menjadi 4 macam yaitu pengangguran *struktural*, pengangguran *friksional*, pengangguran *siklikal* dan pengangguran musiman.

Pengangguran *struktural* merupakan jenis pengangguran yang di akibatkan perubahan struktur dalam perekonomian Perubahan tersebut disebabkan kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan jenis dan keterampilan yang berbeda. Pengangguran *friksional* terjadi disebabkan adanya kesenjangan antara tenaga kerja dan lapangan pekerjaan. Kesenjangan tersebut berupa kesenjangan waktu, informasi dan jarak. Pengangguran *sikikal* merupakan pengangguran yang berkaitan dengan naik turunnya kegiatan perekonomian suatu negara yang biasanya di sebabkan terjadi resesi atau depresi yang menyebabkan pemberi kerja memutuskan hubungan kerja kepada pekerjanya. Pengangguran musiman merupakan pengangguran yang di sebabkan pergantian musim atau terdapat jeda waktu pekerjaan apabila terjadi pergantian musim ke musim lainnya.

Haryono (2017) berpendapat cara untuk mengetahui pengangguran suatu daerah dapat di bedakan menjadi tiga bagian, yang pertama bekerja penuh yaitu orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya telah mencapai 35 jam ke atas. Kedua setengah menganggur yaitu mereka yang bekerja tetapi belum dimanfaatkan secara penuh atau bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Ketiga

menganggur yaitu suatu keadaan dimana seseorang tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan.

Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi di Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase dari jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang tinggi di suatu daerah. Gambar 1.1 dibawah ini menunjukkan perbandingan tingkat pengangguran terbuka tahun 2018-2022 di Indonesia dan di Jawa Timur.



Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia & Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Gambar di atas memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia dan di Jawa Timur, pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur lebih tinggi dari tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Pada tahun 2020 terjadi pandemi covid 19 dan di berlakukannya *social distancing* yang membuat beberapa perusahaan terpaksa berhenti beroperasi dan untuk menekan pengeluaran perusahaan terpaksa melakukan pengurangan pekerja atau PHK, yang pada akhirnya menambah angka pengangguran di suatu wilayah.

Anggoro dan Soesatyo (2015) menyatakan kenaikan jumlah penduduk akan menyebabkan angkatan kerja meningkat, peningkatan angkatan kerja yang

banyak ini diharapkan dapat memicu meningkatnya kegiatan ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan akan tetapi tingginya tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan membuat penyerapan tenaga kerja pun tidak maksimal dan akhirnya mengakibatkan pengangguran.

Badan Pusat Statistik (2022) menyatakan angkatan kerja dibedakan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih bersekolah, ibu rumah tangga, pensiunan dan lain-lain. Selain angkatan kerja juga ada tenaga kerja tenaga kerja yaitu penduduk berusia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja dan yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja. Seseorang dikategorikan sebagai angkatan kerja dan tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15-65 tahun. Tingginya angkatan kerja dapat mempengaruhi pengangguran disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di daerah tersebut. Gambar 1.2 di bawah ini menunjukkan pertumbuhan angkatan kerja tahun 2018-2022 di Jawa Tengah dan Jawa Timur.



Gambar 1.2 Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

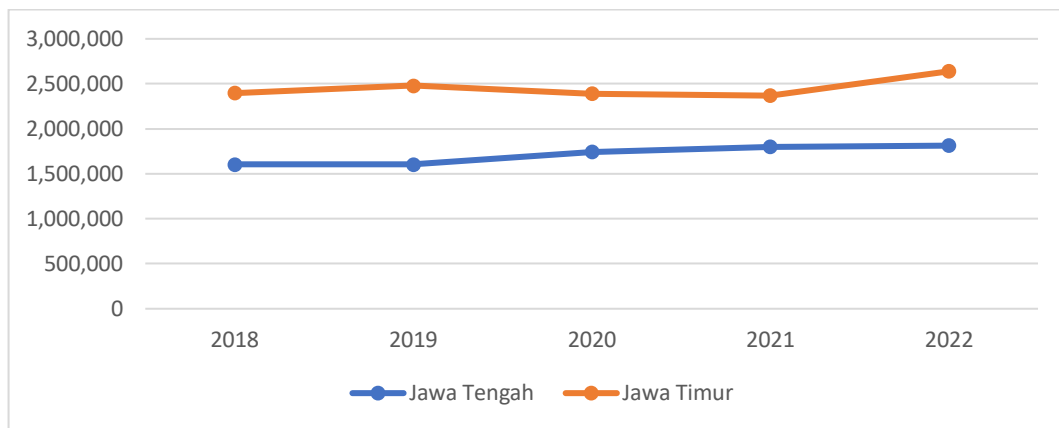
Terlihat dari data diatas menurut Badan Pusat Statistik jumlah angkatan kerja tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan yang disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Berdasarkan data di atas jumlah angkatan kerja di Jawa Timur lebih tinggi dari pada Jawa Tengah terutama di tahun 2019-2020. Kenaikan pada tahun 2020 disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk. Tercatat jumlah penduduk usia kerja di Jawa Timur pada Agustus 2020 sebesar 31,66 juta orang bertambah sekitar 241 ribu orang (0,77 persen) dibandingkan keadaan setahun yang lalu. Jumlah tersebut terdiri dari 22,26 juta orang penduduk angkatan kerja dan 9,39 juta orang penduduk bukan angkatan kerja. Pandemi covid 19 yang melanda dunia yang menyebabkan beberapa perusahaan melakukan PHK untuk beberapa karyawannya untuk menekan pengeluaran. Penduduk yang terkena PHK tersebut pada akhirnya terpaksa mencari pekerjaan yang baru yang pada akhirnya menambah jumlah angkatan kerja di suatu wilayah. Tercatat penduduk yang bekerja sebesar 20,96 juta orang berkurang sekitar 69,65 ribu orang (0,33 persen) dibandingkan keadaan Agustus 2019.

Jumlah penduduk usia kerja di Jawa Timur pada Agustus 2022 sebesar 32,11 juta orang bertambah sekitar 220,79 ribu orang (0,69 persen) dibandingkan keadaan setahun yang lalu. Jumlah tersebut terdiri dari 22,87 juta orang penduduk angkatan kerja dan 9,24 juta orang penduduk bukan angkatan kerja. penduduk yang bekerja sebesar 21,61 juta orang bertambah sekitar 575,54 ribu orang (2,74 persen) dibandingkan keadaan Agustus 2021.

Kota dengan peningkatan paling tinggi di Jawa timur tahun 2022 adalah Surabaya sebanyak 1.643.314 Jiwa dan kota dengan angkatan kerja yang paling rendah adalah Mojokerto sebanyak 72.352 Jiwa. Perkembangan jumlah angkatan kerja lebih cepat dibanding dengan perkembangan lapangan pekerjaan dapat menimbulkan masalah pengangguran. Adam Smith dan David Ricardo menyatakan apabila jumlah angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan tidak seimbang akan menimbulkan peningkatan pengangguran akibat lapangan pekerjaan tidak mampu menyerap semua angkatan kerja yang tersedia (Anggoro & Sesatyo, 2015).

Upah minimum kabupaten/kota juga berpengaruh besar dalam peningkatan angka pengangguran. Badan Pusat Statistik (2022) menyatakan upah minimum kabupaten/kota adalah standar upah minimal yang harus dibayarkan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk diberikan kepada para pekerja di dalam lingkungan usaha atau lingkungan kerja yang berlaku di wilayah kabupaten/kota tersebut. Upah minimum kabupaten/kota diberikan dengan tujuan untuk memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum kabupaten/kota merupakan harga terendah yang diberikan atau dibayarkan kepada pekerja atau buruh. Gambar 1.3

di bawah ini menunjukkan pertumbuhan upah minimum Kabupaten/Kota tahun 2018-2022 di Jawa Tengah dan Jawa Timur.



Gambar 1.3 Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Gambar di atas menunjukkan jumlah upah minimum kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Timur di setiap tahunnya. Data menunjukkan upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur selalu lebih tinggi di setiap tahunnya di banding Jawa Tengah yang selalu menunjukkan peningkatan yang konsisten di setiap tahunnya yang berbeda dengan Jawa Timur di mana upah minimum selalu mengalami peningkatan dan penurunan di tahun tersebut yang disebabkan pertimbangan penetapan UMK 2022 di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. UMK Jatim 2022 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022. Badan Pusat Statistik menyatakan penetapan Upah Minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Komponen Kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan Upah Minimum yang dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja dalam memenuhi kebutuhan mendasar

yang meliputi kebutuhan akan pangan sehari-hari, perumahan, pakaian, pendidikan dan sebagainya.

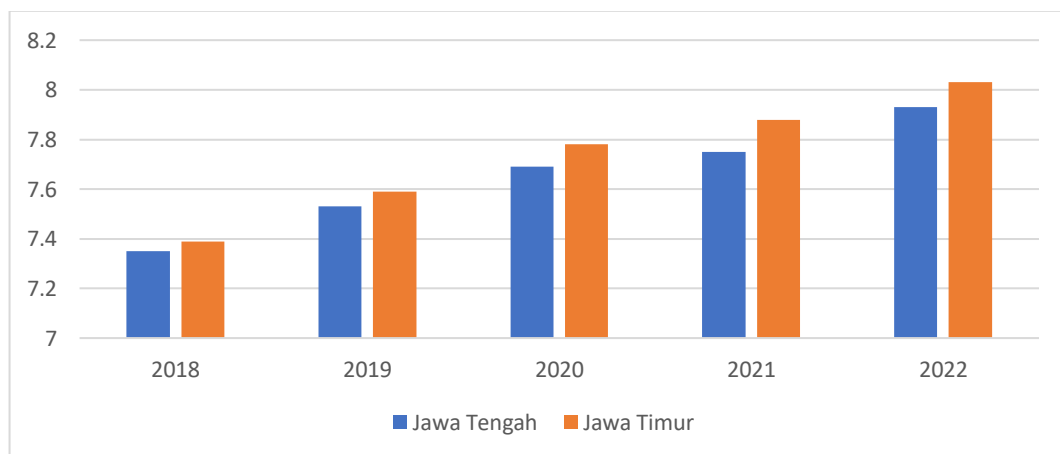
Faktor yang kedua adalah indeks harga konsumen (IHK) yang ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Penurunan upah minimum pada tahun 2019-2021 disebabkan oleh indeks harga konsumen yang mengalami penurunan atau deflasi dikarenakan pandemi covid 19. Sepanjang tahun 2019-2022 Provinsi Jawa Timur mengalami deflasi dimana terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen 136,65 pada bulan Desember 2019 menjadi 107,26 pada bulan Desember 2021.

Kota dengan upah minimum kabupaten/kota paling tinggi di Jawa Timur tahun 2022 adalah Surabaya sebanyak Rp. 3.861.713 dan kota dengan upah minimum kabupaten/kota yang paling rendah adalah Sampang sebanyak Rp.1.441.196. Peningkatan upah minimum kabupaten/kota di tunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong peran pekerja dalam meningkatkan produksi dengan pemberian upah yang memadai (Aruan dan Sriyono, 2016).

Teori kekakuan upah (wage rigidity) oleh Keynes menyatakan kekakuan upah terjadi apabila upah gagal menyesuaikan penawaran tenaga Kerja dengan permintaannya. Jika upah riil berada di atas tingkat keseimbangan, hal ini berarti penawaran tenaga kerja lebih tinggi dari permintaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi dan tidak dapat ditampung oleh perusahaan menyebabkan tingginya angka pengangguran di suatu daerah (Ramiayu, 2015).

Perusahaan memiliki pandangan jika upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan menambah pengeluaran yang harus di bayarkan untuk pekerja, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja yang bertujuan untuk mengurangi biaya produksi, pengurangan tersebut mengakibatkan peningkatan pengangguran. Artinya peningkatan upah minimum pada suatu daerah dapat memberikan dampak positif terhadap angka pengangguran di setiap daerah (Prawira, 2018).

Faktor yang mempengaruhi pengangguran selanjutnya adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang di tempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas seluruh jenjang pendidikan yang pernah di jalani. Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami penduduk usia 25 tahun ke atas. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Gambar 1.4 di bawah ini merupakan rata-rata lama sekolah yang dilihat dari lama tahun pendidikan yang ditempuh



Gambar 1.4 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Data di atas menunjukkan rata rata lama sekolah yang terus meningkat setiap tahunnya, dimana rata-rata lama sekolah di Jawa Timur masih lebih tinggi dari rata-rata lama sekolah di Jawa Tengah. Selama periode 2018 hingga 2022 rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 7,39 tahun (2018) menjadi 8,03 tahun (2022) atau naik 0,64 tahun. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Jawa Timur setara dengan tingkat pendidikan SMP kelas VII. Pertumbuhan yang positif menjadi modal manusia penting untuk mendukung pembangunan di Jawa Timur. Kualitas sumber daya manusia yang semakin membaik dari sisi tingkat pendidikan proses pembangunan secara umum juga akan berlangsung lebih baik. Rata-rata lama sekolah (RLS) dipengaruhi oleh angka putus sekolah akibat tidak mampu membayar biaya pendidikan, di samping itu masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, seperti faktor lingkungan, pemahaman atas pentingnya pendidikan, budaya, ketersediaan sarana/prasarana pendidikan dan lain-lain. Alasan kenaikan rata-rata lama sekolah di Jawa Timur disebabkan oleh program pemerintah yang dilakukan salah satunya adalah dana BOS, Beasiswa, pembebasan SPP dan lain sebagainya. Selain itu masyarakat semakin sadar akan pentingnya sekolah untuk masa depan menjadi alasan peningkatan rata-rata lama sekolah di Jawa Timur. Kota dengan peningkatan paling tinggi di Jawa Timur tahun 2022 adalah Kabupaten Madiun dengan rata-rata lama sekolah selama 11,67 Tahun dan kota dengan rata-rata lama sekolah paling yang paling rendah adalah dengan Kota Sampang rata-rata lama sekolah selama 5,06 Tahun.

Teori Human Capital oleh Gary S. Becker menyatakan pendidikan, pelatihan, dan kesehatan adalah investasi yang paling penting dalam modal manusia. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa sekolah tinggi dan pendidikan tinggi di Amerika Serikat sangat meningkatkan pendapatan seseorang, bahkan setelah

keluar biaya langsung dan tidak langsung dari sekolah. Faktanya bahwa orang dengan pendidikan lebih cenderung memiliki IQ yang lebih tinggi dan lebih baik. Pendapatan orang berpendidikan tinggi hampir selalu jauh di atas rata-rata keuntungan umumnya dan dapat lebih besar di negara berkembang. perbedaan pendapatan rata-rata antara perguruan tinggi dan sekolah di Amerika Serikat selama lima puluh tahun terakhir. lulusan perguruan tinggi memperoleh sekitar 45 persen lebih banyak dari lulusan SMA (Priyono dan Zainuddin, 2016).

Pendidikan dan pelatihan dapat menjadi nilai tambah seorang manusia artinya apabila semakin tinggi pendidikan seseorang atau semakin banyak mengikuti pelatihan maka kemampuan dan keterampilan yang dimiliki semakin tinggi sehingga untuk memperoleh pekerjaan semakin mudah. Ketika tingkat rata-rata lama sekolah suatu daerah naik maka tingkat pengangguran akan mengalami penurunan dan demikian sebaliknya ketika tingkat rata-rata lama sekolah turun maka tingkat pengangguran akan meningkat (Hasan & Azis, 2017).

Hartanto (2017) menjelaskan bahwa untuk tenaga kerja yang memiliki pendidikan rendah akan kesulitan memasuki dunia kerja yang membutuhkan keahlian dan rata-rata lama sekolah minimal 12 tahun atau lebih yang pada akhirnya terpaksa harus menjadi pengangguran, sehingga pendidikan menjadi suatu investasi pada bidang sumber daya manusia yang akan dirasakan pada masa mendatang. Pendidikan akan meningkatkan kualitas dan produktivitas seseorang. peningkatan kualitas ini diharapkan dapat memberikan peluang kerja yang lebih besar bagi pekerja tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas jumlah angkatan kerja, upah minimum, dan rata-rata lama sekolah periode 2018-2022 terus mengalami peningkatan akan tetapi tingkat pengangguran terbuka masih tergolong tinggi. Dari masalah itulah

yang mendasari penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul pengaruh jumlah angkatan kerja, upah minimum kabupaten/kota dan rata-rata lama sekolah di Jawa Timur dengan cakupan 38 Kabupaten/Kota di Jawa timur dalam kurun waktu penelitian 5 tahun mulai dari 2018-2022. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian. Alasan pemilihan ketiga variabel independen tersebut karena variabel tersebut sudah dapat mewakili, menggambarkan serta selaras dengan tujuan penelitian yaitu pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran terbuka yang ada di Jawa Timur, seperti yang di jelaskan di atas bahwa angkatan kerja berpengaruh terhadap perhitungan tingkat pengangguran terbuka dengan cara $TPT = \text{jumlah pengangguran} \times 100\% / \text{jumlah angkatan Kerja}$, upah minimum berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja dan rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga ketiga variabel saling berkaitan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Alasan penulis memilih provinsi Jawa Timur sebagai lokasi penelitian dikarenakan jumlah pengangguran di Jawa Timur masih tergolong tinggi hal tersebut dapat memberikan dampak yang buruk terhadap perekonomian suatu negara.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah jumlah angkatan kerja berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah upah minimum Kabupaten/Kota berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis apakah Jumlah angkatan kerja berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.
2. Menganalisis apakah upah minimum Kabupaten/Kota berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.
3. Menganalisis apakah rata–rata lama sekolah berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat untuk pemerintah, dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka.
2. Manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi penulisan bagi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berikutnya dengan tema yang sama